



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) pendapatan
- b) belanja
- c) transfer
- d) surplus/defisit
- e) pembiayaan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan



kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek
- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) asset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) kewajiban jangka panjang
- i) ekuitas dana

Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir dari Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Beban Operasi meliputi :
 - Beban Pegawai
 - Beban Barang dan Jasa
 - Beban Penyusutan
 - Beban Lain – Lain
 - Surplus/Defisit LO

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan nya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



1.1. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.



Bab 5 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Global Competitiveness Report 2017- 2018, yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) pada 26 September 2017, Indonesia menempati urutan ke-36 secara keseluruhan, naik dari peringkat ke-41 tahun lalu dan naik 14 peringkat dari posisi lima tahun lalu. Indonesia dinilai mampu memperbaiki 10 dari 12 kategori, termasuk kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat Indonesia sebagian besar didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi yang kuat. Laporan tersebut mengakui Indonesia sebagai salah satu inovator teratas di antara negaranegara berkembang, khususnya dalam teknologi pengadaan pemerintah. Namun demikian, WEF mencatat bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan efisiensi di pasar tenaga kerja. Pada sektor ini, Indonesia berada di peringkat 96, karena redundansi biaya yang berlebihan, fleksibilitas penguasaan upah yang terbatas, dan representasi perempuan yang terbatas dalam angkatan kerja. (sumber : <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/2017%20Laporan%20Perkembangan%20Perekonomian%20Bulan%20September%202017.pdf>)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2017 mencapai 5,06 persen (yoy) atau 3,18 persen (qto) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,01 persen (yoy). Pada bulan Oktober 2017 terjadi inflasi sebesar 0,01 persen (mtm) atau 2,68 persen (ytd) dan 3,58 persen (yoy)

Seiring dengan meningkatnya tekanan dari sektor eksternal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada bulan Oktober 2017 mengalami depresiasi Rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan Oktober 2017 mencapai Rp13.526/US\$ atau melemah 1,67 persen (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sempat mencapai level terendah sepanjang tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.630/US\$ pada tanggal 27 Oktober 2017. Pergerakan rupiah sepanjang bulan Oktober dipengaruhi oleh tekanan global terutama kebijakan pemerintahan AS yang berencana melakukan reformasi perpajakan serta spekulasi terhadap terkait rencana pergantian pemimpin baru The Fed yang diperkirakan hawkish. Namun, tejayanya indikator ekonomi makro dalam negeri mampu menjaga nilai tukar rupiah dari depresiasi yang lebih besar. Dengan demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sampai dengan Oktober 2017 mencapai Rp13.352/US\$ atau masih lebih rendah dibandingkan dengan target APBNP 2017 sebesar Rp13.400/US\$. (sumber : <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/2017%20Laporan%20Perkembangan%20Perekonomian%20Bulan%20Oktober%202017.pdf>)



Kondisi makro Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan III 2017 mencatatkan pertumbuhan 5,13% (yoy). Capaian tersebut relatif stabil dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2017 (5,15%; yoy), namun lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (5,01%; yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut tergolong lebih baik apabila dibandingkan perekonomian nasional (5,06%; yoy), meskipun masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa (5,51%; yoy).

Pada triwulan III 2017 inflasi Provinsi Jawa Tengah secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2017. Inflasi Jawa Tengah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3,58% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar -0,18% (qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan II 2017 yang mencatatkan inflasi sebesar 1,34% (qtq). Berdasarkan disagregasi inflasi, penurunan laju inflasi tahunan pada triwulan III 2017 terutama disebabkan oleh kelompok volatile food yang mengalami deflasi sebesar -1,23% (yoy). Deflasi pada kelompok volatile food didorong oleh terjadinya penurunan berbagai harga bahan makanan serta masuknya musim panen beberapa komoditas. (sumber : <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jateng/Pages/KEKR-Provinsi-Jawa-Tengah-November-2017-.aspx>)

2.3. Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dinamika perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang menuntut perubahan Organisasi di Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Jawa Tengah. DISPORAPAR merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu dalam rangka mewujudkan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan



6. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan / Organisasi Olah Raga
7. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
11. Program Pengembangan Kemitraan
12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
0.00.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.754.087.000	4.233.997.011	100%	89,06%	
0.00.2.10.01.01.0001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.000.000	34.699.910	100%	59,83%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.0208	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.106.000.000	1.659.730.566	100%	78,81%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.0503	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Perkantoran Sekretariat	60.000.000	60.000.000	100%	100,00%	
0.00.2.10.01.01.0831	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	200.000.000	198.557.000	100%	99,28%	
0.00.2.10.01.01.1039	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1.892.060.000	1.867.792.100	100%	98,72%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.1247	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	169.523.000	169.270.950	100%	99,85%	
0.00.2.10.01.01.1455	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	160.530.000	158.987.985	100%	99,04%	
0.00.2.10.01.01.1663	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.960.000	52.486.000	100%	79,57%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.2079	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.014.000	32.472.500	100%	77,29%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.2287	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.777.000	13.567.000	100%	91,81%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.2703	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	261.275.000	158.490.000	100%	60,66%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.2911	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi di dalam & luar Daerah	1.531.089.000	1.447.381.091	100%	94,53%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.01.3119	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	4.406.190.000	3.860.328.063	100%	87,61%	Terpenuhinya kebutuhan dinas, Uang kehormatan Pengurus KONI dicairkan s/d bulan November 2017
0.00.2.10.01.01.3743	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	35.000.000	30.288.590	100%	86,54%	Terpenuhinya kebutuhan dinas



Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
0.00.2.10.01.07.01.0089	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Mnyurat Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	900.000	897.660	100%	99,74%	
0.00.2.10.01.07.01.0296	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Informasi & Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	500.000.000	363.571.564	100%	72,71%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.07.01.0504	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	5.000.000	4.791.267	100%	95,83%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.07.01.0920	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Srana Pariwisata	40.000.000	39.882.000	100%	99,71%	
0.00.2.10.01.07.01.1128	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	182.000.000	154.600.000	100%	84,95%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.07.01.1336	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	15.000.000	14.822.313	100%	98,82%	
0.00.2.10.01.07.01.1544	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	34.645.125	100%	98,99%	
0.00.2.10.01.07.01.1752	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	35.000.000	34.522.000	100%	98,63%	
0.00.2.10.01.07.01.2168	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	115.000.000	113.119.200	100%	98,36%	
0.00.2.10.01.07.01.2376	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	7.500.000	7.500.000	100%	100,00%	
0.00.2.10.01.07.01.2792	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Informasi & Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	42.000.000	41.762.450	100%	99,43%	
0.00.2.10.01.07.01.3000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	50.000.000	38.355.400	100%	76,71%	Terpenuhinya kebutuhan dinas
0.00.2.10.01.07.01.3208	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	702.500.000	644.660.750	100%	91,77%	Terpenuhinya kebutuhan dinas



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
0.00.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.284.145.000	3.120.402.372	100%	95,01%	
0.00.2.10.01.02.1545	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	48.000.000	44.560.000	100%	92,83%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
0.00.2.10.01.02.1665	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.263.000.000	1.199.437.650	100%	94,97%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
0.00.2.10.01.02.2081	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	508.000.000	436.471.722	100%	85,92%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
0.00.2.10.01.02.2377	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	26.000.000	26.000.000	100%	100,00%	
0.00.2.10.01.02.2585	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	35.000.000	35.000.000	100%	100,00%	
0.00.2.10.01.02.2793	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	10.500.000	10.500.000	100%	100,00%	
0.00.2.10.01.02.2913	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	170.000.000	164.270.000	100%	96,63%	
0.00.2.10.01.02.3417	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.000.000	549.200	100%	10,98%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
0.00.2.10.01.02.4785	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.218.645.000	1.203.613.800	100%	98,77%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
0.00.2.10.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	280.000.000	243.500.000	100%	86,96%	
0.00.2.10.01.04.0001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	210.000.000	174.400.000	100%	83,05%	Sesuai dengan kebutuhan untuk sertifikasi pelatih dan wasit
0.00.2.10.01.04.0417	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	70.000.000	69.100.000	100%	98,71%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Tersepanya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.08.07	Program Pembibitan, Pembinaan dan Masyarakatan Olah Raga	78.338.983.000	70.527.072.149	100%	90,03%	
2.10.2.10.01.08.07.0002	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	9.278.234.000	8.745.391.465	100%	94,26%	
2.10.2.10.01.03.07.0003	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	65.151.749.000	58.324.009.684	100%	89,52%	hasil negosiasi lelang kegiatan POPNAS, sisa perjalanan dinas luar daerah wasit - juri luar kota POPNAS karena sebagian dibiayai dari Kemenpora,tidak semua cabor mengambil fasilitasi KONI kegiatan penyelenggaraan Kejurprov Senior, Junior, penyelenggaraan kejurnas dan pengiriman kejurnas, pengiriman kejuaraan internasional cabor bilyar dan aeromodelling tidak dapat diambil karena kode rekening tidak sesuai
2.10.2.10.01.03.07.0004	Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	680.000.000	440.415.000	100%	64,77%	sub kegiatan psop (pembinaan sentra olahraga prestasi) jangka panjang semula dianggarkan untuk 10 cabor tetapi hanya terlaksana 1 cabor (cabor sepatu roda) karena 9 cabor tidak dapat mengadakan seleksi terkendala dengan waktu (di bulan desember), kegiatan psop jangka panjang dianggarkan di apbd perubahan
2.10.2.10.01.03.07.0005	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	1.229.000.000	1.057.781.000	100%	86,07%	Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar negeri pemberangkatan kontingen SOINA (Tim sepakbola tuna Grahita)
2.10.2.10.01.03.07.0006	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	2.000.000.000	1.959.475.000	100%	97,97%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.02.11	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan	1.387.500.000	1.323.326.845	100%	95,37%	
2.10.2.10.01.02.11.0003	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	211.500.000	206.050.000	100%	97,42%	
2.10.2.10.01.02.11.0006	Kegiatan Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	414.200.000	407.836.845	100%	98,46%	
2.10.2.10.01.11.0004	Kegiatan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	761.800.000	709.440.000	100%	93,13%	Sesuai dengan kebutuhan, sisa nego dan efisiensi pada uang harian peserta, belanja ATK, dekorasi dan dokumentasi, perlengkapan peserta, jasa narasumber, penggadaan, makan minum rapat dan kegiatan, serta belanja perjalanan dinas

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.03.12	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olah Raga	16.970.648.000	16.892.623.000	100%	99,54%	
2.10.2.10.01.03.12.0001	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	16.475.830.000	16.410.625.000	100%	99,60%	
2.10.2.10.01.03.12.0002	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	157.999.000	151.979.000	100%	96,19%	
2.10.2.10.01.03.12.0003	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	189.220.000	183.470.000	100%	96,96%	
2.10.2.10.01.03.12.0004	Kegiatan Pengembangan industri Olahraga	147.599.000	146.549.000	100%	99,29%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.02.10	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	864.000.000	859.540.000	100%	99,48%	
2.10.2.10.01.02.10.0001	Kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	864.000.000	859.540.000	100%	99,48%	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.02.09	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	3.596.587.000	3.390.314.900	100%	94,26%	
2.10.2.10.01.02.09.0001	Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	646.605.000	620.153.000	100%	95,91%	Efisiensi perjalanan dinas dan uang harian peserta kegiatan sumpah pemuda
2.10.2.10.01.02.09.0002	Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	1.300.000.000	1.184.650.000	100%	91,13%	anggaran untuk sub kegiatan pkkp (biaya hidup peserta pkkp - uang harian peserta kegiatan) semula dianggarkan selama 10 bulan, terealisasi 9 bulan karena pengajuan keuangan yang baru dimulai bulan februari 2017.
2.10.2.10.01.02.09.0003	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	500.000.000	470.744.900	100%	94,15%	efisiensi perjalanan dinas dan belanja pakaian olahraga kaos peserta sub kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan hiv/aids bagi generasi muda
2.10.2.10.01.02.09.0004	Seleksi dan Pemanapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	761.000.000	734.135.000	100%	96,47%	
2.10.2.10.01.02.09.0005	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	388.982.000	380.632.000	100%	97,85%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.2.10.01.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	95.237.480.000	80.253.329.532	100%	84,27%	
2.10.2.10.01.04.08.0002	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	95.237.480.000	80.253.329.532	100%	84,27%	efisiensi perjalanan dinas dan honorarium non pns

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
3.02.2.10.01.04.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9.286.380.000	8.781.630.761	100%	94,56%	
3.02.2.10.01.04.02.0002	Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata	625.000.000	608.520.860	100%	97,36%	
3.02.2.10.01.04.02.0003	Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata	6.371.380.000	6.160.494.600	100%	96,69%	
3.02.2.10.01.06.02.0005	Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata	1.190.000.000	1.066.864.700	100%	89,65%	Efisiensi anggaran Perjalanan dinas
3.02.2.10.01.06.02.0008	Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata	500.000.000	498.373.140	100%	99,67%	
3.02.2.10.01.07.02.0007	Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng	600.000.000	447.377.461	100%	74,56%	Sesuai kebutuhan, Sisa Nego dan efisiensi pada dokumentasi/ dekorasi, jasa Nara Sumber, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
3.02.2.10.01.03	Program Pengembangan Kemitraan	1.520.673.000	1.423.216.467	100%	93,59%	
3.02.2.10.01.03.0006	Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata	200.000.000	179.866.570	100%	89,93%	Sesuai dengan kebutuhan, dan efisiensi pada belanja dekorasi / dokumentasi, jasa narasumber makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas
3.02.2.10.01.06.03.0002	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	475.000.000	458.766.497	100%	96,58%	
3.02.2.10.01.06.03.0005	Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	845.673.000	784.583.400	100%	92,78%	Efisiensi anggaran cetak dan perjalanan dinas

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
3.02.2.10.01.07.01	Program pengembangan pemasaran pariwisata	6.569.965.000	6.062.196.925	100%	92,27%	
3.02.2.10.01.07.01.0008	Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi	593.750.000	512.040.000	100%	86,24%	Sisa Negosiasi harga
3.02.2.10.01.05.01.0003	Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran	2.463.215.000	2.393.493.069	100%	97,17%	
3.02.2.10.01.05.01.0004	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri	475.000.000	373.986.824	100%	78,73%	sesuai kebutuhan sisa perjalanan dinas luar negeri dan luar daerah
3.02.2.10.01.05.01.0009	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri	2.000.000.000	1.902.587.600	100%	95,13%	Sesuai kebutuhan, Sisa Nego dan efisiensi pada dokumentasi/ dekorasi, jasa Nara Sumber, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas
3.02.2.10.01.05.01.0010	Kegiatan pengembangan pasar pariwisata	1.038.000.000	880.089.432	100%	84,79%	Sesuai kebutuhan, Sisa Nego dan efisiensi pada dokumentasi/ dekorasi, jasa Nara Sumber, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas



3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Permasalahan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut : 1) Belum optimalnya penerapan IPTEK Olahraga dalam proses pembibitan, pemanduan dan pembinaan prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar, 2) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga olahraga maupun dunia usaha, 3) kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan.

Permasalahan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah antara lain : 1) belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Jawa Tengah, 2) kurangnya kualitas dan kuantitas sarana pemasaran pariwisata, 3) Infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai, 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata, 5) rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan, 6) kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UMKM sektor pariwisata, 7) pembiayaan untuk pengembangan usaha pariwisata di Jawa Tengah masih tinggi, 8) belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif, 9) belum optimalnya kerjasama/kemitraan antara stakeholder terutama dalam memanfaatkan sektor swasta dalam pembangunan kepariwisataan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar



dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;



- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.832.706.555,00 atau 123.95% dari target Rp 2.285.300.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.832.706.555, 00	98.33	Rp 1.046.289.500,00
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.832.706.555, 00	98.33	Rp 1.046.289.500,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.832.706.555,00 atau 123.95% dari target Rp 2.285.300.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00		Rp 1.046.289.500,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 38.750.000,00		
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.832.706.555, 00	123.95%	Rp 1.046.289.500,00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 Rp 2.793.956.555,00 atau 122,26 % dari target Rp 2.285.300.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00:

	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00	122.26	Rp 1.046.289.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00	122.26	Rp 1.046.289.500,00

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.789.450.699,00 atau 122,26% dari target Rp 2.835.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp 602.521.000,00	Rp 833.245.700,00	138,29	Rp 1.046.289.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	Rp 1.020.000.000,00	Rp 1.117.077.500,00	109,52	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 662.779.000,00	Rp 843.633.355,00	127,29	
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00	123,95	Rp 1.046.289.500,00



5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 38.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

	2016		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain		Rp 38.750.000,00		0
Jumlah		Rp 38.750.000,00		Rp 0

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 154.338.089.062,00 atau 91,95 % dari anggaran Rp 167.847.076.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 47.838.476.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 48.476.719.000,00	Rp 46.450.409.194,00	95,82	Rp 20.143.396.551,00
Belanja Barang & Jasa	Rp 119.370.357.000,00	Rp 107.887.679.868,00	90,38	Rp 27.695.080.035,00
Jumlah	Rp 167.847.076.000,00	Rp 154.338.089.062,00	91,95	Rp 47.838.476.586,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 46.450.409.194,00 atau 95,82 % dari anggaran Rp 48.476.719.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 20.144.638.821,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 32.433.687.000,00	Rp 31.300.812.444,00	96,51	Rp 16.254.865.595,00
Belanja Pegawai langsung	Rp 16.043.032.000,00	Rp 15.149.596.750,00	94,43	Rp 3.888.530.956,00
Jumlah	Rp 48.476.719.000,00	Rp 46.450.409.194,00	95,82	Rp 20.144.638.821,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 107.887.679.868,00 atau 90,38 % dari anggaran Rp 119.370.357.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 27.695.080.035,00 dengan rincian sebagai berikut :



	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	10.955.145.000,00	9.074.754.229,00	82,84%	1.686.625.000
Belanja Bahan/Material	580.951.000,00	577.870.200,00	99,47%	91.068.000
Belanja Jasa Kantor	23.079.194.000,00	21.301.661.644,00	92,30%	6.758.634.182
Belanja Premi Asuransi	519.670.000,00	499.121.000,00	96,05%	253.047.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	523.000.000,00	446.367.922,00	85,35%	266.066.465
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.609.000,00	1.691.536.360,00	97,18%	552.432.556
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	13.022.945.000,00	10.606.439.406,00	81,44%	2.709.761.900
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.696.300.000,00	5.377.885.000,00	94,41%	406.300.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.017.995.000,00	4.539.866.500,00	90,47%	280.510.000
Belanja Makanan dan Minuman	13.265.564.000,00	11.575.870.368,00	87,26%	7.149.642.550
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00%	148.471.000
Belanja Pakaian Kerja	32.150.000,00	32.150.000,00	100,00%	0
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.876.185.000,00	2.726.195.000,00	94,79%	475.635.000
Belanja Perjalanan Dinas	12.700.193.000,00	10.452.719.870,00	82,30%	2.166.947.832
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	374.500.000,00	330.277.000,00	88,19%	283.500.000
Belanja Pemeliharaan	1.980.891.000,00	1.867.088.235,00	94,25%	1.355.245.100
Belanja Jasa Konsultasi	476.355.000,00	460.572.500,00	96,69%	47.082.000
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.220.030.000,00	1.105.501.634,00	90,61%	740.621.450
Belanja Hadiah barang	642.730.000,00	555.853.000,00	86,48%	160.290.000
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.576.950.000,00	24.576.950.000,00	100,00%	2.163.200.000
Belanja Pengadaan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	119.370.357.000,00	107.887.679.868,00	90,38%	27.695.080.035,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 81.614.480.678,00 atau 85,68 % dari anggaran Rp 95.251.290.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 48.192.547.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 545.322.000,00	Rp 532.805.350,00	99,49	Rp 899.899.800,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 94.705.968.000,00	Rp 81.081.675.328,00	86,05	Rp 45.586.447.540,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Rp 940.500.000,00
Jumlah	Rp 95.251.290.000,00	Rp 81.614.480.678,00	87,26	Rp 48.192.547.340,00



5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 532.805.350,00 atau 97,70 % dari anggaran Rp 545.322.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 899.899.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	Rp 199.177.000,00
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 443.727.000,00	Rp 432.545.350,00	97,48	Rp 665.248.800,00
Belanja Alat-alat Studio dan komunikasi	Rp101.595.000,00	Rp 100.260.000,00	98,68	Rp 45.474.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	Rp 545.322.000,00	Rp 532.805.350,00	97,70	Rp 899.899.800,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 81.081.675.328,00 atau 85,61 % dari anggaran Rp 94.705.968.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 45.596.447.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 94.705.968.000,00	Rp 81.081.675.328,00	85,61	Rp 45.596.447.540,00
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	Rp 94.705.968.000,00	Rp 81.081.675.328,00	85,61	Rp 45.596.447.540,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 940.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Pengadaan Alat Olahraga	-	-	-	940.500.000,00
Jumlah	-	-	-	940.500.000,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar (Rp 233.119.863.185,00) sedangkan Tahun 2016 sebesar (Rp 260.813.066.000,00)



5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 118.249.363.487,77 naik sebesar Rp 4.910.675.129,64 atau 4.30 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 114.072.649.192,13

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp 65.659.800,00 turun sebesar Rp 912.610.766,67 atau 93.29 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 978.270.566,67

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 36.072.936,- naik sebesar Rp 36.072.936,- atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	36.072.936	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	36.072.936	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1	Kas di BPP Balai Pasporapar	36.072.936	0
2			
	Jumlah	36.072.936	0

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	Kas di BPP Bidang Pemasaran	36.072.936	36.072.936
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.



NO	URAIAN	2017	2016
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	2017	2016
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1	-	-	-
2			
	Jumlah		



Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2017	2016
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp 159.833.332,00 naik sebesar Rp 97.689.998,67,00 atau 157,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 62.143.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Asuransi BMD	31.949.750	62.143.333,33
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	31.949.750	62.143.333,33

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.728.823.224,00 naik



sebesar Rp 2.727.657.524,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.165.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	1.751.573.590	1.165.700
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak	1.050.000	-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah	977.249.634	-
Jumlah	2.728.823.224	1.165.700

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp 325.157.967.732,00 naik sebesar Rp 154.082.609.195,00 atau 90,06% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 171.075.358.537,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 171.075.358.537,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 81.614.480.678,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 22.900.000,00
Hibah	Rp 8.309.078.665,00
Mutasi Masuk	Rp 64.145.241.064,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 3.580.468.820,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 157.672.169.227,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 9.091.212,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 3.580.468.820,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 3.589.560.032,00
Grand Total	Rp 325.157.967.732,00

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 75.710.290.500,00 saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 50.948.948.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Tanah	75.710.290.500	24.761.342.000		50.948.948.500
Jumlah	75.710.290.500	24.761.342.000		50.948.948.500

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 50.948.948.500,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 24.761.342.000,00



Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 75.710.290.500,00

Mutasi masuk sebesar Rp 24.761.342.000,00 berasal dari nilai aset tanah yang dipecah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena pembentukan SOTK baru.

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp 29.061.083.202,00 naik sebesar Rp 15.695.578.727,00 atau 117,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.365.504.475,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	3.528.445.000			3.036.091.000
Alat Angkut	5.679.395.397	461.951.871	235.901.871	3.125.407.156
Alat Bengkel dan Ukur	45.300.000			45.300.000
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.910.031.221	343.975.000	29.950.500	6.267.135.817
Alat Studio dan Komunikasi	3.897.911.584	381.275.000		891.570.502
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Jumlah	29.061.083.202	1.269.701.871	265.852.371	13.365.504.475

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 13.365.504.475,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 532.805.350,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 22.900.000,00
Hibah	Rp 37.880.000,00
Mutasi Masuk	Rp 15.025.134.589,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 15.769.859.939,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 9.091.212,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 65.190.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp



Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	74.281.212,00
Grand Total	Rp	29.061.083.202,00

Penambahan Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp 37.880.000,00 berasal dari Hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2017 berupa bantuan pengadaan alat laboratorium dan olahraga (laptop Fujitsu dan CD Physical Training Software)

Penambahan mutasi masuk peralatan dan mesin sebesar Rp 15.025.134.589,00 berasal dari :

- Mutasi masuk sebesar Rp 14.911.014.589,00 berasal dari nilai aset peralatan dan mesin yang dipecah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena pembentukan SOTK baru. Perincian sebagai berikut : 1) Alat-alat besar : Rp 457.374.000,00; 2) Alat-alat Angkut : Rp 2.445.988.241,00; 3) Alat Kantor dan Rumah Tangga : Rp 9.166.361.266,00; 4) Alat Studio dan Komunikasi : Rp 2.841.291.082,00;
- Mutasi antar SKPD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 114.120.000,00 terdiri dari 1) Rp 108.000.000,00 berupa alat angkut (3 unit mobil Toyota kijang) dari BPKAD (bidang aset), 2) Rp 6.120.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga (1 unit mesin absensi).

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 215.146.410.999,00 naik sebesar Rp 113.118.058.568,00 atau 110,86 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 102.028.352.431,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	211.245.932.588	113.365.808.568	3.515.278.820	101.395.402.840
Monumen	3.900.478.411	3.267.528.820		632.949.591
Jumlah	215.146.410.999	116.633.337.388	3.515.278.820	102.028.352.431

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	102.028.352.431,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	81.081.675.328,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	8.171.583.665,00
Mutasi Masuk	Rp	24.142.549.575,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	3.237.528.820,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	116.633.337.388,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	3.515.278.820,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	



Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 3.515.278.820,00
Grand Total	Rp 215.146.410.999,00

Penambahan Hibah aset gedung dan bangunan sebesar Rp 8.171.583.665,00 berasal dari Hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tanggal 01 Maret 2017 berupa pekerjaan pembangunan prasarana olahraga Api Abadi Merapen

Penambahan mutasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp 24.142.549.575,00 berasal dari nilai aset gedung dan bangunan yang dipecah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena pembentukan SOTK baru dengan rincian sebagai berikut : 1) bangunan gedung: Rp 24.112.549.575,00; 2) bangunan monumen : Rp 30.000.000,00.

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.681.883.541,00 saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.581.268.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan	817.042.818	99.615.000		717.427.818
Bangunan Air/Irigasi	51.080.091			51.080.091
Instalasi	225.454.455			225.454.455
Jaringan	588.306.177			588.306.177
Jumlah	1.681.883.541	99.615.000		1.581.268.541

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.581.268.541,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp 99.615.000,00
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 99.615.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 1.681.883.541,00

Penambahan Hibah aset Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp 99.615.000,00 berasal dari Hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2017 berupa pekerjaan pengaspalan halaman museum Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMP) dari anggaran APBN th 2013.



5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.909.529.490,00 naik sebesar Rp 216.214.900,00 atau 12.77 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.693.314.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	188.157.500	141.302.900		46.854.600
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	1.721.371.990	74.912.000		1.646.459.990
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	1.909.529.490	216.214.900		1.693.314.590

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.693.314.590,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 216.214.900,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 216.214.900,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 1.909.529.490,00

Penambahan mutasi aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 216.214.900,00 berasal dari nilai aset Aset Tetap Lainnya yang dipecah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena pembentukan SOTK baru dengan perincian sebagai berikut : 1) buku perpustakaan: Rp 141.302.900,00; 2) bangunan monumen : Rp 74.912.000,00.

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.711.699.922,00 saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.711.699.922,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung Tearter Tertutup Tahap I - VII	6.711.699.922			6.711.699.922
Jumlah	6.711.699.922			6.711.699.922



Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Tgl kontrak	Nilai kontrak	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan DED Asrama Atlet Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	Th 2016	Th 2016	755.700.000	755.700.000	100
2	Penyusunan DED Sekolah Khusus Olahraga	Komplek GOR Jatidiri Semarang	Th 2016	Th 2016	701.270.000	701.270.000	100
3	Penyusunan Review DED Penyempurnaan Stadion Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/5581	01-11-2017	49.390.000	49.390.000	100
4	Penyusunan Review DED Penyempurnaan GOR Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/5921.1	20-11-2017	48.500.000	48.500.000	100
5	Penyusunan Review DED Asrama Atlit	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/5921.2	20-11-2017	49.760.000	49.760.000	100
6	Penyusunan Review DED Gedung Terpadu II	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/6045.1	27-11-2017	44.150.000	44.150.000	100
Jumlah					1.648.770.000	1.648.770.000	100

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.456.970.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 191.800.000,00
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 191.800.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 1.648.770.000,00

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 36.848.327.355,71 naik sebesar Rp 26.213.208.793,03 atau 246,48 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.635.118.562,68 dengan rincian sebagai berikut :



	2017	2016
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Buku Perpustakaan	841.000,00	841.000,00
Barang Bercork Kebudayaan	-	-
Hewan dan Tumbuhan	-	-
Jumlah	127.550.400,00	127.550.400,00

5.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0 turun sebesar Rp 750.375.634,00 atau 100 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 750.375.634,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	-	-
Alat Angkut	-	-
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.696.900,00	121.696.900,00
Alat Studio dan Komunikasi	5.012.500,00	5.012.500,00
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	-	-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Jumlah	126.709.400,00	126.709.400,00

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 233.119.863.185,00 naik sebesar 9.504.580.049,97 atau 64,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar 141.725.391.801,92

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.511.836.791,00 naik sebesar Rp 10.000.247.291,00 atau 661,57 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.511.589.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Asli daerah	Rp 3.202.758.126,00	Rp 1.511.589.500,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 8.309.078.665,00	
Jumlah	Rp 11.511.836.791,00	Rp 1.511.589.500,00



5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.202.758.126,00 naik sebesar Rp 2.156.468.626,00 atau 206,11 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.793.956.555,00	Rp 1.046.289.500,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 408.801.571,00	-
Jumlah	Rp 3.202.758.126,00	Rp 1.046.289.500,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.793.956.555,00 naik sebesar Rp 1.747.667.055,00 atau 167,03 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.046.289.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.793.956.555,00	Rp 1.747.667.055,00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah	Rp 2.793.956.555,00	Rp 1.747.667.055,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 408.801.571,00 naik sebesar Rp 408.801.571,00 atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	Rp 408.801.571,00	-
Jumlah	Rp 408.801.571,00	-

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.309.078.665,00 naik sebesar Rp 7.843.778.665,00 atau 1.685,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 465.300.000,00 akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat , berupa :

- Pekerjaan pengaspalan halaman Museum Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMP), pembiayaan dari anggaran APBN th 2013 senilai Rp 99.615.000,00, hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Oktober 2017 (Berita Acara Hibah telampir)



- Pekerjaan pembangunan prasarana Api Abadi Merapen senilai Rp 8.171.583.665,00 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tanggal 01 Maret 2017 (Berita Acara Hibah telampir)
- Pekerjaan pengadaan alat laboratorium dan olahraga (laptop Fujitsu dan CD Physical Training Software sebesar Rp 37.880.000,00 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2017 (Berita Acara Hibah telampir)

5.1.1. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 159.177.769.647,36 naik sebesar Rp 107.451.665.442,12 atau 207,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 51.726.104.205,24

5.1.1.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp 159.177.769.647,36 naik sebesar Rp 107.451.665.442,12 atau 207,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 51.726.104.205,24

	2017	2016
Beban Pegawai	46.450.409.194,00	20.143.396.551,00
Beban Barang & Jasa	105.062.332.345,33	27.707.825.801,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.294.976.537,03	3.874.881.852,57
Beban Lainnya	370.051.571,00	
Jumlah	159.177.769.647,36	51.726.104.205,24

5.1.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.450.409.194,00 naik sebesar Rp 26.307.012.643,00 atau 130,60 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 20.143.396.551,00

	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	31.300.812.444,00	16.254.865.595,00
Beban Pegawai Langsung	15.149.596.750,00	3.888.530.956,00
Jumlah	46.450.409.194,00	20.143.396.551,00

5.1.1.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 105.062.332.345,33 naik sebesar Rp 77.354.506.543,66 atau 279,18 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 27.707.825.801,67

	2017	2016
Beban Persediaan	24.701.073.267,00	11.009.152.156,00
Beban Jasa	42.687.856.051,33	10.463.714.248,67
Beban Pemeliharaan	2.313.456.157,00	1.621.311.565,00
Beban Perjalanan Dinas	10.452.719.870,00	2.166.947.832,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	24.907.227.000,00	2.446.700.000,00
Jumlah	105.062.332.345,33	27.707.825.801,67



5.1.1.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.294.976.537,03 naik sebesar Rp 3.420.094.684,46 atau 88,26 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.874.881.852,57

	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	7.294.976.537,03	3.874.881.852,57
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	0	0
Jumlah	7.294.976.537,03	3.874.881.852,57

5.1.1.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp 370.051.571,00 saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00

	2017	2016
Beban Penyisihan Piutang	370.051.571	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Beban Penghapusan Aset	-	-
Beban lain-lain	-	-
Jumlah	745.620.634	0



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah

6.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DISPORAPAR sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
dan



Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 33 jabatan struktural, jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretaris, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kepala UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasie Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, Kasie Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasie, Kasie Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Kasie Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kasie Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie Sarana Pemasaran, Ka Sie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie Pembinaan dan pengasuhan pada eselon IV.

Table 6.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	56
2	Bidang keolahragaan	26
3	Bidang Kepemudaan	21
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	20
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	21
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	19
7	UPT Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	28
8	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	38
Jumlah		229

Table 6.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	34
2	Golongan III	120
3	Golongan II	71
4	Golongan I	4
Jumlah		229



6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung kantor	3	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang Jl Pemuda No. 136 Semarang Jl. Pemuda No. 145 Semarang
2	Komplek Stadion	1	Komplek Stadion Jatidiri Semarang
3	Museum Olahraga Mrapen	1	Mrapen di Kab. Grobogan
4	Hotel	4	Hotel Karimunjawa Inn - Kab. Jepara Hotel Garuda Kopeng - Kab. Semarang Hotel Pondok Slamet - Kab. Banyumas Hotel Pringgosari - Kab. Karanganyar
5	Rest Area	1	Kabupaten Tegal



BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2017.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2017, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.